Sosioekologi PLTSa

Oleh Gede H. Cahyana

Juli 2007 ini Wali Kota Bandung hendak meletakkan batu pertama pembangunan PLTSa di Gedebage, Bandung. Meskipun kontroversial, Pemkot bersikukuh pada rencananya. Kartu trufnya ialah kecepatan pemunah sampah tetapi lupa pada fabel tentang kelinci dan kura-kura. Selaku binatang lincah, kelinci mengejek kura-kura sebagai hewan lamban. Singkat cerita, diadakanlah lomba lari. Semua binatang bertaruh untuk kelinci. Tak satu pun yang mendukung kura-kura karena dianggap pecundang. Lomba pun dimulai. Betullah, kelinci melesat meninggalkan kura-kura. Akhirnya, yang menang adalah.... kura-kura!

Kecepatan, inilah milik kelinci. Begitu pun PLTSa (baca: insinerasi, pembakaran). Tumpukan daun akan berkurang kalau dibakar, sisanya berupa abu. Sepintas tampak solutif. Masalahnya muncul kalau yang dibakar bukan daun melainkan material pelepas polutan B3. Karena reduksi volumenya 90%, beratnya 80% maka abunya perlu TPA khusus B3 sehingga PLTSa menjadi solusi parsial. Yang kura-kura ialah sanfil dan *composting*. Keduanya lamban dalam mereduksi sampah karena memberdayakan bakteri. Namun tetap punya kepastian degradasi, menambah unsur hara tanaman. Karbondioksida yang dirilisnya digunakan untuk fotosintesis vegetasi lalu menebarkan oksigen.

Sosiobudaya

Keunggulan teknologi (baca: kecepatan) bukanlah jaminan atas solusi sampah Bandung. Ada aspek lain seperti ekonomi, politik, sosial, dan legal. Demikian menurut tim FS PLTSa ITB. Ada satu aspek yang (sengaja) ditinggalkan, yaitu ekologi, interaksi manusia dan lingkungan. Konyugasinya disebut sosioekologi (sosiobudaya, ekonomi, dan ekologi atau ekonologi).

Berbeda dengan negara di Eropa, Amerika, Jepang, Cina, dan Singapura yang tinggi taraf kesehatannya, sebagai negara berkembang, agraris, dan agamis, masalah sampah bisa didekati dari sosiobudaya, melibatkan kondisi sosial, tradisi, kepercayaan dan agama. Dengan memasukkan agamawan (ruhaniwan), tetua adat, tokoh masyarakat maka pembiasaan reduksi sampah bisa dilakukan. Apalagi kalau dibantu penyuluhan oleh dinas-dinas. Ini serupa dengan evolusi keberterimaan program KB oleh masyarakat.

Pendekatan sosiobudaya sulit ditempuh di negara yang kuat individualismenya sebab massa sulit dilibatkan untuk implementasi 7R. Wajarlah insinerasi menjadi pilihan. Di Indonesia berbeda. Orang Indonesia berguyub. Paguyuban menjadi keseharian dalam bertetangga. Lewat sosiobudaya inilah sampah dikelola, diolah di RT/RW, melibatkan Karang Taruna, PKK, ormas, partai politik, murid SD s.d universitas.

Gerakan ini tak perlu teknologi mahal dan riskan. Apalagi semua teknologi punya kelemahan. Bagaimana kalau kelemahan itu berdampak luas? Tak perlu terjadi dua atau lebih kecelakaan, seperti halnya tak perlu terjadi dua atau lebih tsunami di Aceh. Sekali saja sudah fatal, merusak lingkungan. Oleh sebab itu, PLT Nuklir (Muria misalnya) yang besar bahayanya ditentang keras. PLT Sampah pun bisa masuk kategori itu karena sekali

saja kecelakaan sudah lebih dari cukup untuk melahirkan petaka ekologi (*ecological disaster*).

Itu sebabnya, yang dinilai bukanlah aspek kecepatan melainkan efeknya atas manusia dan lingkungan. Ini yang dikhawatirkan. Manusia harus sehat, lingkungan harus dikonservasi. Berhati-hati (*precautionary principle*) dan mencegah lebih baik daripada mengobati atau rehabilitasi pascabencana. Memadaiakah paramedis, dokter, dan fasilitas kesehatan di rumah sakit? Adakah prosedur operasi standar atas bencana PLTSa? Bagaimana tindakan *step by step* yang dikaitkan dengan sosibudaya orang Bandung?

Lantaran itulah pola yang bersahabat dengan lingkungan lebih tepat karena melibatkan masyarakat. Konsep 7R (*reduce, reuse, recycle, replace, recovery, relocation, dan responsible*) layak digunakan karena kita punya struktur formal-informal pemerintahan yang bagus. Ada *responsible*, tanggung jawab bersama, pejabat dan rakyat. Dari pejabat puncak bertaut-tautan sampai ke RT/RW. Dalam sekejap ajakan pejabat mudah sampai ke warga lewat RT/RW, Karang Taruna, PKK, Posyandu, ormas, sekolah, dll sebagai paguyuban.

Ini lah sentral gerakan massal dari teropong sosiobudaya. Solutif, murah, dan tahan lama tanpa batas waktu. Semua dilaksanakan dengan penyuluhan dan promosi melibatkan pejabat dan perangkatnya, dewan, fungsionaris dan kader partai, ormas plus keluarganya. Semua bergerak tak sekadar formalitas. Layaklah dikuatkan dengan kebijakan dewan (*policy*) agar kuat memayunginya segera setelah RUU Pengelolaan Persampahan diundangkan. *Draft*-nya bisa disiapkan mulai sekarang.

Ekonologi

PLTSa menghasilkan listrik. Tapi listriknya dijual kepada warga, tidak gratis, padahal bahan bakarnya dari warga. Ini bertolak belakang dengan sanfil, *composting*, dan 7R yang keuntungannya justru untuk warga. Yang terlibat tak hanya duapuluh atau duaratus warga tapi ratusan ribu. Warga se-Bandung bisa melibatkan diri dalam mengelola sampah sekaligus melestarikan fungsi lingkungan. Sampah dari rakyat, dikelola oleh rakyat (dan pemerintah), dan untuk rakyat (juga untuk pemerintah yang diringankan pekerjaannya dan hemat APBD).

Apalagi kalau mengacu ke pasal sosioekologi: pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi (dan udara), air, dan sumber daya alam dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sebanyak-banyaknya rakyat boleh memperoleh sumber ekonomi dari sampah, khususnya pemulung, kolektor dan usaha kecil-menengah dan sektor informal. Banyak mata rantai dan komunitas warga yang hidupnya bergantung pada sampah. Sampah diupayakan berguna lagi, tidak dibakar sehingga membantu kalangan bawah yang (kebetulan) baru bisa mencari uang dengan mengais sampah.

Bagaimana mekanismenya? Pemerintah kota lewat PD. Kebersihan yang dibantu Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dapat memulai pembuatan pabrik pengelola dan pengolah sampah sekaligus tempat praktik Mulok PLH. Pabrik itu dibuat atas jenisnya, misalnya plastik, kain, pipa, logam. Cara ini sudah berjalan sebagian tapi pemerintah

belum mendukungnya. Ketika bisnis makanan-minuman menghasilkan sampah, pebisnis sampah justru mereduksi sampah. Terjadilah serentak *reuse*, *recovery*, dan *recycle*.

Selain membuat pabrik, pemerintah hendaklah membantu distribusi produknya sekaligus menurunkan pengangguran. Sektor hulu-hilir sampah ini dapat melibatkan ratusan ribu orang. Pemerintah tinggal mengatur tata niaganya. Misalnya, dalam proyek konstruksi (sipil) dan permesinan, benda olahan sampah dengan konsep *reuse*, *recycle*, *recovery* itu dapat digunakan. Upaya ini akan meramaikan bursa bisnis sampah. Lalu adakanlah peraturan pendukungnya termasuk kemudahan kredit banknya.

Yang terakhir, aspek ekologi. Intinya, *sanitary landfill* (sanfil) yang sudah penuh bisa ditanami pohon menjadi hutan kota, penyumbang oksigen dan kenyamanan. Juga bisa dijadikan daerah tujuan wisata berwajah ekowisata. Malah bisa dijadikan permukiman setelah tuntas biodegradasinya. Ini pun perlu dukungan *composting* dan konsep 7R.

Alternatif bukan pilihan

Merujuk studi kelayakan ITB, disimpulkan bahwa alternatif bukanlah pilihan melainkan opsi (*option*). Kalau berupa opsi atau alternatif berarti PLTSa harus duduk setara dengan opsi lainnya: sanfil & *composting*. Lakukan juga FS-nya, tak hanya untuk PLTSa. Opsi artinya belum tentu terpilih (kecuali sengaja dipilih sehingga menjadi pilihan atau tunjuk langsung). Alternatif itu harus dikaji dan diuji bersama. Keunggulannya dan kerugiannya mesti dibeberkan secara jujur tanpa *vested interest*, murni kajian akademik secara sosioekologi, politik dan legal.

Dalam kajian itu diutamakan aspek pembelajaran masyarakat agar ikut bertanggung jawab atas kebersihan kota, bukan dididik membuang sampah sebanyak-banyaknya. Pemberdayaan ini tak bisa instan. Namun pendekatan paguyuban inilah opsi positif bagi Bandung, bukan untuk negara lain yang tinggi *income* per kapitanya, baik fasilitas kesehatannya, dan sudah memilah sampah. Di Indonesia, yang tinggi pendidikannya belum tentu memilah sampah. Jadi..., inilah kesempatan untuk memassalkan gerakan 7R, apalagi sudah ada Perda K3.

Penanganan sampah yang solutif ialah berbasis masyarakat karena dari masyarakatlah sumber sampahnya. Upaya ini butuh waktu. Murid pun perlu 12 tahun agar bisa menjadi mahasiswa. Mengubah karakter tak semudah membuang sampah. Perlu ilmu, konsistensi kebijakan, dan pembiasaan. Ini harus dimulai dari pejabat publik agar memilah-milah sampahnya lantas diikuti masyarakat.

Karena diapit pegunungan, Bandung hendaklah diarahkan menjadi kota yang bersahabat dengan lingkungan. Ini dapat ditempuh lewat Mulok PLH yang akan mendekatkan murid pada kecerdasan intelektual (*intellectual intelligence*), beretika baik (*emotional intelligence*) dan cerdas lingkungan (*enviro intelligence*) lantas bermuara di *spiritual intelligence*. Maka, perlu mengajak ruhaniwan, selain pemerintah, dewan, tokoh, tetua adat, ormas, perusahaan (UKM), dan sekolah s.d perguruan tinggi.

Hikmah fabel di atas, dengan kesalahan kecil saja, kelinci yang gesit larinya akhirnya dikalahkan kura-kura dan menjadi bencana di jagat kehewan. Kata sahibul hikayat, kura-kura yang lamban ternyata menjadi juara. Maka..., jangan pula PLTSa menjadi bencana ekologi di tanah cekung Bandung.*

Penulis, pengamat lingkungan, dosen Universitas Kebangsaan Bandung.